



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 261 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VI, LAMPIRAN XII, LAMPIRAN XXXV, LAMPIRAN XXXVII
DAN LAMPIRAN XLVIII KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah Lampiran VI, Lampiran XII, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVII dan Lampiran XLVIII Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran VI, Lampiran XII, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVII dan Lampiran XLVIII Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu sebagai berikut :
- A. Pengguna Anggaran :
1. Menyusun RKA-SKPD;
 2. Menyusun DPA-SKPD;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. Menandatangani SPM;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- B. Kuasa Pengguna Anggaran :
- Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran meliputi :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Menandatangani SPM;
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; dan
 8. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- C. Bendahara Penerimaan :
1. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Penatausahaan atas penerimaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian;
 3. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Keputusan Pokok Daerah (SKP-Daerah), Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKR-Daerah), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tanda Bukti Pembayaran dan Bukti Penerimaan lainnya yang sah;

4. Bendahara Penerimaan pada SKP-Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berjalan; dan
5. Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada SKPD selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 Januari bulan berikutnya.

D. Bendahara Pengeluaran :

1. Membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengendalikan realisasi pelaksanaan anggaran;
2. Membuat SPP, SPM dan kwitansi/tagihan yang akan ditandatangani oleh pengguna Anggaran;
3. Melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan pencatatan pada Kartu Kendali Anggaran;
5. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Pengguna Anggaran;
6. Membuat surat pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan, ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Membuka rekening atas nama SKPD pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Lolak;
8. Melakukan pemungutan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPn (Pajak Penambahan Nilai) serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan bendahara;
9. Bertanggungjawab atas segala akibat pengeluaran keuangan yang timbul;
10. Membuat daftar gaji pegawai pada Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
11. Mengirim Daftar Gaji dan SPM Gaji pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

12. Melakukan penghitungan kembali apabila terdapat Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Berkala dan Tunjangan Jabatan dari pegawai yang ada;
13. Mengurus/melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji kepada masing-masing pegawai;
14. Melakukan pemungutan PPh dari masing-masing yang wajib atas PPh sesuai ketentuan yang berlaku;
15. Bertanggungjawab atas pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Melaksanakan penarikan dana dari bank dengan menyiapkan slip penarikan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pengguna Anggaran;
17. Mencatat penerimaan dan pengeluaran di Buku Simpanan atau Buku Bank;
18. Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran di Buku Kasir;
19. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
20. Mencatat transaksi di buku panjar bila ada pengeluaran yang belum di SPJ-kan oleh PPTK;
21. Mencatat transaksi di Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran;
22. Melaksanakan pencatatan Buku Register;
23. Membantu PPK dalam penyiapan SPP dan SPM; dan
24. Menyiapkan SPJ berdasarkan dokumen dari Kasir.

E. Bendahara Penerimaan Pembantu :

Untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

F. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan fungsi sebagai kasir, atau pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 13 - 08 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN 1 : KEPUTUBAHAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 261 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 - 08 - 2019

TERTANGGUNG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VI, LAMPIRAN XII, LAMPIRAN XXXV, LAMPIRAN XXXVII DAN LAMPIRAN XLVIII KEPUTUBAHAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMUSULUKAN/PERUBAHAN/PERUBAHAN PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEREMBAHAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No	DINAS/BADAN/ SEKRETARIAT/ KANTOR / KECAMATAN	NAMA / NIP / GOLONGAN / FANGKAT						KET
		3	4	5	6	7	8	
	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PEREMBAHAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PEREMBAHAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1								
1	Dinas Kesehatan Pembina. IV/a Nip. 10721226 200212 2 001	Dr. H. Sahars Albugis, MPHIM Nip. 19770622 198503 2 010 KPA Puskesmas Lolak	Ani Wawur, S.Kep Nip. 19670622 198503 2 010 KPA Puskesmas Lolak	Lella Alhwa Pengatur Muda Tk I, II/b Nip. 19631033 201312 2 001	Emi Ajala, SKM, MM Pembina Tk I, III/d Nip. 19630714 200902 2 002	Sabrina D. Sumarseno, SKM, MM Pembina Tk I, III/d Nip. 19860114 200902 2 002	Puskesmas Lolak	
		RI Nyoman Susanto, S.Kep, Ns Nip. 19650920 198503 2 005 KPA Puskesmas Piyem	Daddy Pepene Nip. 19641229 198503 1 015 KPA Puskesmas Mopone		Linda L. Mongkan, S.Kep, Ns Nip. 19770420 200701 1 018	Iman Mingsinta, AMKG Nip. 19770420 200701 1 018	Puskesmas Piyem	
		Mince Y. Taroreh, SE Nip. 19700502 199103 2 009 KPA Puskesmas Pias Barat			RI Ketut Sari Ayu Ringali Nip. 19790907 201001 2 008		Puskesmas Mopone	
		Softin, S.KM Nip. 19700609 199303 1 007 KPA Puskesmas Pangiat			Medyati Bugha, A.Md.Keb Nip. 19800723 200801 2 014		Puskesmas Pias Barat	
		Aasa Gondala, SKM Nip. 19641124 198502 2 002 KPA Puskesmas Tadoy			Yulianingsi Peputungan, AMKL Nip. 19780909 200801 2 028		Puskesmas Pangiat	
		I Made Golo Arshana Nip. 19740324 199803 1 005 KPA Puskesmas Werthi Agung			Trens Detunselang, S.ST Nip. 19850220 200803 2 002		Puskesmas Tadoy	
		Berry Daeng Masanga, SKM Nip. 19761028 200701 2 020 KPA Puskesmas Komanggan			I Gusri Ayu Daba Widhyati, S.ST Nip. 19791202 200701 2 018		Puskesmas Werthi Agung	
		Adani S. Lumenta, S.ST, M.Kes Nip. 19771104 200604 2 019 KPA Puskesmas Hsandi			Puziab Makodongan, A.Md.Keb Nip. 19910216 201704 2 001		Puskesmas Komanggan	
		Bertlan Mokorimban, S.Kep Nip. 19810714 200604 1 013 KPA Puskesmas Tinggi			Nuffida Pangalia, S.ST Nip. 19791122 200604 2 008		Puskesmas Hsandi	
					Vernesty Laksana, ST.Kb Nip. 19801004 200801 2 015		Puskesmas Tinggi	

NAMA / NIP / GOLONGAN / FASGKAT

1 No	2 UNTAH/BADAN/ SEKRETARIAT/ KANTOR / KECAMATAN	3 PENGGUNA ANGGARAN	4 KIASA PENGGUNA ANGGARAN	5 BERDAHARA PENERIMAAN	6 BERDAHARA PERGELUARAN	7 BERDAHARA PERGELUARAN PEMBANTU	8 NET
		<p>Roy Benjamin Maxi Tumb Nip. 19691215 199103 1 007 KPA Puskesmas Pogor</p> <p>Mohamad Temin Beluwu, SKM Nip. 19800322 200604 1 010 KPA Puskesmas Tamayan</p> <p>Muhard, SKM Nip. 19740412 199803 1 001 KPA Puskesmas Dolotus</p> <p>Jusaidi Mamonoto, SKM Nip. 19690805 199103 1 010 KPA Puskesmas Maebang</p> <p>Zubaida Mokoginta, S.ST Nip. 19821123 200801 2 011 KPA Puskesmas Hialang</p> <p>Riliantini Adela Maneking Nip. 19881107 199103 2 013 KPA Puskesmas Buzada</p> <p>Felma Penusings, S.ST Nip. 19660607 198703 2 009 KPA Puskesmas Inohotito</p>				<p>Helda Fella, S.ST Nip. 19680116 198903 2 007</p> <p>Sri Wahyuani Pudal Nip. 19830704 200801 2 013</p> <p>Syams Helen Hapoh, A.Md.Keb Nip. 19781113 200801 2 015</p> <p>Ronal R. Meksantung, A.Md.Kep Nip. 19810922 201503 1 001</p> <p>Herima Faria Mokoginta, A.Md.RL Nip. 19781107 200801 2 032</p> <p>Rina Tangkudung, S.Pd, M.Biotech Nip. 19801201 200601 2 016</p> <p>Salsa Ginaga, SMMG Nip. 19840505 200902 2 001</p>	<p>Puskesmas Pogor</p> <p>Puskesmas Tamayan</p> <p>Puskesmas Dolotus</p> <p>Puskesmas Maebang</p> <p>Puskesmas Hialang</p> <p>Puskesmas Buzada</p> <p>Puskesmas Inohotito</p>

Handwritten signature



BOLAANG MONGONDOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW

NOMOR 261 TAHUN 2019
 TANGGAL 13-08-2019

TENTANG PERUBAHAN 43 AN LAMPIRAN VI, LAMPIRAN XII, LAMPIRAN XXXV, LAMPIRAN XLVIII KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUNAN/PEMBENTARAN/PEMBAGIAN/KELOMPOKAN ANGGARAN/KELOMPOKAN PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PEMERINTAH, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMERINTAH PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELOMPOKAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KET
		PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PEMERINTAH	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PEMERINTAH PEMBANTU		
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	DR.(HC). Ramlah, SE, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19661009 199403 2 005			Wahyuningath Agast Pembina Muda III/c Nip. 19840904 200301 2 012		Rachmadiani Pengatur, II/c Nip. 19770821 200801 2 011	



JASTO SEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

161 TAHUN 2019
13. 03. 2019

HOMER FANGCAL TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VI, LAMPIRAN XII, LAMPIRAN XXXV, LAMPIRAN XXXVII DAN LAMPIRAN XLVIII KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJUKUKAN/PELETAKAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No	DIRAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT					KET
		PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	
1	Kantor Camat Dumoga Barat	Desai Potabugs, SE Pembina, IV/a Nip. 19630302 199203 1 008			I Wayan Butarpa, A.Md Pengatur Tk I, II/d NIP. 19760818 201410 1 002	Briwahjo Sumalla Pengatur Muda Tk I, II/b Nip. 19850731 201102 1 002	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MARSUPREDOJO MOKOGOW

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

HOMOR 261 TAHUN 2019
 TARIGAL 13 - 08 - 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN VI, LAMPIRAN XI, LAMPIRAN XXXV, LAMPIRAN XXXVI DAN LAMPIRAN XLVIII KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBINAAN/PEMBETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA / NIP / GOLONGAN / FANGKAT						KET
		PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	Kantor Camat Dumoga Utara	Hamandu Mamonto, S.Pd Pembina, IV/a Nip. 19710302 199303 1 007			Renni Sogcha, S.Pd Pemata Muda Tk I, III/e Nip. 19721206 200801 1 012		Stevy Kabu Pengantar, III/c NIP-19810917 200701 2 007	

[Handwritten Signature]
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 ASPEK SUPREDO MOKOAGOW

